



Analisis Tingkat Efisiensi Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Dina Lirna Lumban Tobing¹, Giotavany Alexandria Ramadhani², Louis David Talahatu³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email : datatobing30@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan rasio efisiensi belanja berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja mengacu pada kriteria Mahsun (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja sebesar Rp1.486.034.731.553 dari total anggaran Rp1.546.244.225.554 menghasilkan rasio efisiensi sebesar 96,11%. Berdasarkan kriteria Mahsun (2016), nilai tersebut termasuk dalam kategori tidak efisien. Namun demikian, capaian kinerja organisasi mencapai 100%–104% dari target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran mampu mendukung pencapaian sasaran organisasi secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian efisiensi pada sektor publik tidak dapat hanya didasarkan pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan capaian kinerja yang dihasilkan. Oleh karena itu, evaluasi efisiensi perlu dilakukan secara komprehensif untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Efisiensi belanja; anggaran daerah; kinerja pemerintah; pengelolaan anggaran; Dinas Pemuda dan Olahraga

Abstrack:

This study aims to analyze the level of spending efficiency at the DKI Jakarta Provincial Youth and Sports Agency in 2024. The study employs a quantitative descriptive method using secondary data sourced from the 2024 Government Agency Performance Report (LKIP) of the DKI Jakarta Provincial Youth and Sports Agency. Data collection was conducted through documentation, while data analysis utilized an expenditure efficiency ratio based on a comparison between actual expenditures and the budgeted expenditures, in accordance with Mahsun's (2016) criteria. The results of the study indicate that actual expenditures of Rp1,486,034,731,553 out of a total budget of Rp1,546,244,225,554 resulted in an efficiency ratio of 96.11%. Based on Mahsun's (2016) criteria, this value falls into the "inefficient" category. However, the organization's performance achieved 100%–104% of the set targets, indicating that budget utilization effectively supported the optimal achievement of the organization's objectives. The research results indicate that efficiency assessments in the public sector cannot be based solely on budget absorption rates but must also consider the resulting performance achievements. Therefore, efficiency evaluations must be conducted comprehensively to obtain a more accurate picture of the quality of local financial management.

Keywords: *Expenditure efficiency; local budgets; government performance; budget management; Department of Youth and Sports*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Kewenangan tersebut menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi dan pengendalian anggaran, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Mardiasmo, 2018).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. APBD berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui APBD, pemerintah daerah menentukan prioritas pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBD sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Semakin besar anggaran yang dialokasikan kepada suatu perangkat daerah, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul dalam memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output yang optimal. Menurut Halim dan Kusufi (2018), efisiensi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat atau apabila sumber daya yang tersedia mampu menghasilkan output yang maksimal. Dalam sektor publik, efisiensi memiliki peran yang sangat penting karena sumber daya yang digunakan berasal dari dana publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pentingnya efisiensi dalam sektor publik semakin meningkat seiring dengan penerapan konsep *value for money* dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Konsep *value for money* menekankan bahwa penggunaan dana publik harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomi berkaitan dengan kemampuan organisasi memperoleh sumber daya dengan biaya yang wajar, aspek efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, sedangkan aspek efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penerapan prinsip tersebut, pemerintah tidak hanya dituntut untuk merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis efisiensi menjadi salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah serta menilai sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Selain efisiensi, pengukuran kinerja juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran tersebut. Dalam konteks pemerintahan modern, keberhasilan suatu organisasi tidak lagi hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, melainkan juga berdasarkan kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hubungan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pengelolaan keuangan sektor publik.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui bidang kepemudaan dan keolahragaan. Instansi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga, pembinaan atlet, pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga bagi masyarakat. Peran tersebut menjadikan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu perangkat daerah yang berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang produktif, berdaya saing, dan memiliki karakter yang kuat, sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah maupun nasional. Mengingat luasnya cakupan tugas dan fungsi yang dimiliki, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan pengelolaan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, total pagu anggaran yang dikelola mencapai Rp1.546.244.225.554 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.486.034.731.553 atau sebesar 96,11 persen dari total anggaran yang tersedia. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang telah dialokasikan berhasil digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat realisasi anggaran pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, realisasi belanja tercatat sebesar Rp759.918.662.023 dari total pagu anggaran Rp1.001.064.304.193 atau sebesar 75,90 persen. Peningkatan realisasi anggaran dari 75,90 persen menjadi 96,11 persen menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program, pengendalian kegiatan, dan pengelolaan anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun demikian, tingginya tingkat realisasi anggaran belum dapat secara langsung menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Dalam praktik pengelolaan keuangan

sektor publik, tingginya serapan anggaran sering kali dipandang sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program. Namun, ukuran tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Penilaian efisiensi memerlukan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara anggaran yang digunakan dan hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut. Dengan kata lain, evaluasi terhadap efisiensi tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana penggunaan anggaran mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara optimal.

LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menunjukkan bahwa berbagai indikator kinerja yang ditetapkan mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya berhasil menyerap anggaran dalam jumlah besar, tetapi juga mampu menghasilkan capaian kinerja yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi belanja dan efektivitas pencapaian kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 berdasarkan pendekatan Mahsun (2016). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi secara sistematis dan objektif berdasarkan data angka (Sugiyono, 2019). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi belanja Dispora DKI Jakarta secara terukur berdasarkan dokumen keuangan resmi.

Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Data sekunder dipilih karena menyediakan informasi yang lengkap dan relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelaah LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 serta berbagai literatur pendukung berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan efisiensi belanja dan pengelolaan keuangan sektor publik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio efisiensi dan rasio efektivitas berdasarkan konsep pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahsun (2016). Rasio efisiensi digunakan untuk menilai tingkat penggunaan anggaran melalui perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, sedangkan rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penggunaan kedua rasio tersebut dimaksudkan agar penilaian pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih komprehensif, sehingga tidak hanya menilai besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga keberhasilan pencapaian sasaran organisasi.

Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Perhitungan rasio efisiensi mengacu pada Mahsun (2016) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan diinterpretasikan menggunakan kriteria penilaian efisiensi Mahsun (2016): rasio di atas 100% = sangat tidak efisien; 90%–100% = tidak efisien; 80%–90% = cukup efisien; 60%–80% = efisien; dan di bawah 60% = sangat efisien.

Selanjutnya, rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan rasio efektivitas mengacu pada Mahsun (2016) dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas diinterpretasikan berdasarkan kriteria Mahsun (2016), yaitu rasio di atas 100% dikategorikan sangat efektif, 90%–100% efektif, 80%–90% cukup efektif, 60%–80% kurang efektif, dan di bawah 60% tidak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Realisasi Anggaran Dispora DKI Jakarta Tahun 2024

Berdasarkan LKIP Dispora DKI Jakarta Tahun 2024 (halaman 5, 54, dan 62), total pagu anggaran yang ditetapkan adalah sebesar **Rp1.546.244.225.554** dengan realisasi belanja mencapai **Rp1.486.034.731.553** atau capaian serapan sebesar **96,11%**. Sisa anggaran yang tidak terserap (SILPA) adalah sebesar Rp60.209.494.001 atau 3,89% dari total pagu. LKIP secara eksplisit menyebutkan bahwa "anggaran yang tidak terserap pada tahun 2024 adalah anggaran pembangunan, pengembalian hibah, dan Permakanan Atlet PPOP" (Dispora DKI Jakarta, 2024, hal. 62). Ini menunjukkan bahwa ketidakterserapan anggaran memiliki alasan teknis yang spesifik dan teridentifikasi.

Dispora DKI Jakarta melaksanakan tugasnya melalui 4 (empat) program utama. Realisasi anggaran per program disajikan pada Tabel 1 berikut, yang bersumber dari Tabel 3.7 LKIP Dispora DKI Jakarta 2024.

Tabel 1. Realisasi Anggaran per Program Dispora DKI Jakarta TA 2024

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
---------	-----------	----------------	-------------

Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	22.289.012.128	21.248.232.073	95.33%
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	4.361.681.548	4.303.788.346	98.67%
Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1.147.255.274.078	1.109.285.112.935	96.69%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	372.338.257.800	351.197.598.199	94.32%
TOTAL	1.546.244.225.554	1.486.034.731.553	96.11%

Sumber: LKIP Dispora DKI Jakarta 2024, Tabel 3.7 (diolah)

Dari Tabel 1 terlihat bahwa Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan mendominasi anggaran dengan porsi sebesar 74,2% dari total pagu (Rp1.147.255.274.078), dengan realisasi sebesar 96,69%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menempati posisi kedua dengan pagu Rp372.338.257.800 dan serapan terendah sebesar 94,32%. Sementara itu, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan mencatat serapan tertinggi sebesar 98,67%, diikuti Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 95,33%.

Dominasi anggaran pada Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan menunjukkan bahwa fokus utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan atlet. Besarnya alokasi anggaran pada program tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan olahraga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingginya tingkat realisasi anggaran pada program ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Secara lebih rinci, realisasi anggaran masing-masing SKPD dan UKPD di bawah koordinasi Dispora DKI Jakarta disajikan pada Tabel 2, yang bersumber dari Tabel 3.11 LKIP Dispora DKI Jakarta 2024.

Tabel 2. Realisasi Anggaran per SKPD/UKPD Dispora DKI Jakarta TA 2024

SKPD/UKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Dinas Pemuda dan Olahraga (induk)	1.273.878.749.785	1.227.067.064.411	96.33%
Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	58.480.832.478	53.568.508.237	91.60%
Sudin Pemuda & Olahraga Jakpus	17.566.016.292	17.317.749.955	98.59%
Sudin Pemuda & Olahraga Jakut	28.491.124.538	27.147.825.840	95.29%
Sudin Pemuda & Olahraga Jakbar	16.357.160.888	15.660.077.447	95.74%
Sudin Pemuda & Olahraga Jaksel	25.264.739.763	24.882.308.193	98.49%

Sudin Pemuda & Olahraga Jaktim	27.562.350.530	27.206.491.107	98.71%
UP Gelanggang Jakarta Pusat	15.552.275.527	14.404.141.846	92.62%
UP Gelanggang Jakarta Utara	27.816.490.581	26.984.972.428	97.01%
UP Gelanggang Jakarta Barat	12.492.348.608	11.490.877.082	91.98%
UP Gelanggang Jakarta Selatan	14.868.324.054	14.200.695.500	95.51%
UP Gelanggang Jakarta Timur	27.913.812.510	26.104.019.507	93.52%
TOTAL	1.546.244.225.554	1.486.034.731.553	96,11%

Sumber: LKIP Dispora DKI Jakarta 2024, Tabel 3.11 (diolah)

Dari Tabel 2, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur mencatat serapan tertinggi sebesar 98,71%, diikuti Suku Dinas Jakarta Pusat (98,59%) dan Suku Dinas Jakarta Selatan (98,49%). Serapan terendah terjadi pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Barat (91,98%) dan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (91,60%). Variasi serapan anggaran antar unit ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas pelaksanaan anggaran yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan ke depan.

Perbedaan tingkat serapan anggaran antar unit kerja menunjukkan adanya variasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik kegiatan, kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas pelaksanaan program, serta proses pengadaan barang dan jasa yang berbeda pada masing-masing unit kerja. Meskipun demikian, seluruh unit kerja menunjukkan tingkat serapan di atas 90 persen yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan dengan baik.

2. Perhitungan dan Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan formula rasio efisiensi Mahsun (2016) pada persamaan (1) dan data LKIP Dispora DKI Jakarta 2024, perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp1.486.034.731.553}}{\text{Rp1.546.244.225.554}} \times 100\% = 96,11\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan rasio efisiensi belanja Dispora DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar **96,11%**. Mengacu pada Tabel 3 (kriteria Mahsun, 2016), angka ini menempatkan Dispora DKI Jakarta pada kategori "**Tidak Efisien**" karena berada pada rentang 90%–100%. Hal ini bermakna bahwa dari setiap Rp100 yang dianggarkan, Dispora DKI Jakarta membelanjakan Rp96,11 — menyisakan Rp3,89 yang tidak terserap. Dalam terminologi Mahsun (2016), kondisi ini dikategorikan tidak efisien karena penggunaan anggarannya mendekati atau hampir menghabiskan seluruh pagu yang tersedia.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja Daerah (Mahsun, 2016) dan Posisi Dispora DKI Jakarta 2024

Rasio Efisiensi	Kategori	Posisi Dispora DKI Jakarta 2024
> 100%	Sangat Tidak Efisien	—
90% – 100%	Tidak Efisien	96,11% → TIDAK EFISIEN
80% – 90%	Cukup Efisien	—
60% – 80%	Efisien	—
< 60%	Sangat Efisien	—

Sumber: Mahsun (2016), diolah

Hasil rasio efisiensi sebesar 96,11 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Berdasarkan kriteria Mahsun (2016), nilai tersebut termasuk kategori tidak efisien karena berada pada rentang 90–100 persen. Namun demikian, interpretasi efisiensi dalam sektor publik perlu dilakukan secara hati-hati. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, sektor publik lebih menekankan pada pencapaian manfaat dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat penggunaan anggaran yang tinggi tidak selalu menunjukkan pengelolaan yang buruk apabila diikuti dengan capaian kinerja yang sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, interpretasi rasio efisiensi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks capaian kinerja yang menyertainya. LKIP Dispora DKI Jakarta 2024 secara eksplisit menyajikan data efisiensi penggunaan sumber daya per indikator sasaran (Tabel 3.9 LKIP), yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara serapan anggaran dan capaian kinerja.

Tabel 4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dispora DKI Jakarta Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Indeks Pembangunan Pemuda	Angka Partisipasi & Kepemimpinan Pemuda	100%	95,88%	4,12%
Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Kesadaran Berolahraga	% Penduduk ≥ 10 tahun yang berolahraga	104%	96,11%	3,89%

Sumber: LKIP Dispora DKI Jakarta 2024, Tabel 3.9

Berdasarkan Tabel 4, tingkat serapan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta berada pada kisaran 95,88%–96,11%, sedangkan capaian kinerja yang dihasilkan mencapai 100%–104% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

organisasi mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja dengan penggunaan anggaran yang tidak terserap secara penuh. Dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,89%–4,12%, hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara optimal sehingga menghasilkan capaian kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, meskipun berdasarkan kriteria Mahsun (2016) rasio efisiensi sebesar 96,11% termasuk dalam kategori tidak efisien, dari perspektif kinerja organisasi penggunaan anggaran dapat dinilai telah memberikan hasil yang efektif karena mampu mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara maksimal.

3. Analisis Tren Realisasi Anggaran 2023–2024

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, analisis tren realisasi anggaran Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada Tabel 5, yang bersumber dari Tabel 3.12 LKIP Dispora DKI Jakarta 2024.

Tabel 5. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
2023	1.001.064.304.193	759.918.662.023	75.90%
2024	1.546.244.225.554	1.486.034.731.553	96.11%

Sumber: LKIP Dispora DKI Jakarta 2024, Tabel 3.12 (diolah)

Tabel 5 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dari 75,90% pada tahun 2023 menjadi 96,11% pada tahun 2024. Selain itu, pagu anggaran juga meningkat dari Rp1.001.064.304.193 menjadi Rp1.546.244.225.554 atau sebesar 54,5%. Berdasarkan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, peningkatan serapan anggaran tersebut antara lain didorong oleh penganggaran penghargaan PON dan PEPARNAS 2024 pada APBD Perubahan yang terealisasi sebesar 100%, serta adanya koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan dan pengendalian anggaran.

Peningkatan tingkat serapan anggaran pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya realisasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, kondisi tersebut mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sehingga sisa anggaran yang tidak terserap dapat diminimalkan.

Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, peningkatan serapan anggaran ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator membaiknya kapasitas organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Temuan ini sejalan dengan pendapat Rahman dan Saputra (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, tingginya tingkat serapan anggaran tidak serta-

merta menunjukkan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah berlangsung secara efisien. Oleh karena itu, analisis terhadap capaian kinerja tetap diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan realisasi anggaran tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang sejalan dengan tujuan dan sasaran organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efisiensi belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang dihitung menggunakan rasio efisiensi belanja menurut Mahsun (2016) sebesar 96,11%. Berdasarkan kriteria yang digunakan, nilai tersebut termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada pada rentang 90%–100%. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang telah dialokasikan berhasil direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Meskipun demikian, hasil analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%–104%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran yang direalisasikan telah mampu mendukung pencapaian sasaran organisasi secara optimal. Dengan demikian, meskipun secara teknis rasio efisiensi berada dalam kategori tidak efisien berdasarkan klasifikasi Mahsun (2016), dari perspektif kinerja organisasi penggunaan anggaran dapat dinilai telah memberikan hasil yang efektif karena mampu menghasilkan output sesuai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian efisiensi pada sektor publik tidak dapat hanya didasarkan pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan capaian kinerja yang dihasilkan. Oleh karena itu, evaluasi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kualitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- (Chandra et al., 2022; Habibi et al., 2024; Halim & Kusufi, 2018; Indonesia, 2014; Jakarta, 2024; Mahsun, 2016; Mardiasmo, 2018; Rahman & Saputra, 2022; Sugiyono, n.d.)Chandra, C. P. S., Darwanis, & Ibrahim, R. (2022). Efisiensi Belanja Modal Pemerintah Daerah : Studi Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh. *AFRE Accounting and Financial Review*, 5(2), 222–232. <https://doi.org/https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr/article/view/8037>
- Habibi, Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 483–488. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Jakarta, D. P. dan O. P. D. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024*. [https://dispورا.jakarta.go.id/assets/public_information/LKIP 2024.pdf?](https://dispورا.jakarta.go.id/assets/public_information/LKIP%2024.pdf?)

Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st ed.). BPFE-Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>

Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.